

Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi

Mohammad Bustanol Husein*

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Opini Kiyai Madura: Rencana Pemekaran Madura Menjadi Provinsi”. Tujuan Penelitian ini yakni mengetahui kronologi rencana pemekaran wilayah Madura dan opini kiyai Madura terhadap rencana provinsi Madura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas sehingga bisa memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Teori yang digunakan adalah teori elit Suzanne Keller mengenai elit strategis dalam kehidupan modern dewasa ini, dimana selanjutnya Kiyai diposisikan sebagai elit strategis.

Hasil dari penelitian, terdapat kronologis panjang sejak awal 1999-2013 dimana terjadi pasang surut semangat dalam pembahasan rencana pemekaran Madura disebabkan prioritas Kiyai lebih pada pembangunan Jembatan Suramadu. Kesimpulan selanjutnya kiyai belum memiliki kesamaan opini dalam memandang rencana pemekaran Madura. Ada perbedaan opini pro dan kontra opini Kiyai mengenai waktu pemekaran bisa dilaksanakan, hal demikian yang membuat rencana tersebut hanya masih berupa wacana.

Kata Kunci : Provinsi Madura, Kiyai, Opini

Abstract

The research title is “Opini Kiyai Madura: Rencana Pemekaran Madura Menjadi Provinsi”. Purpose of the research is to know the chronology of regional expansion plans and Madura kiyai’s opinion about Madura province. The method used in this research is a qualitative method in which researchers try to construct reality so he can pay attention to processes, events and authenticity. The theory used is Suzanne Keller elite theory regarding strategic elites in modern life today, which is positioned as strategic elite.

The results of the research, there was a long chronological beginning 1999-2013 where there is a spirit dynamics in the discussion of expansion plans about Madura province. That case, Kiyai get priority about the development of Suramadu Bridge so it would decrease kiyai’s concentrate to discuss about the plan of Madura province. The next conclusion, Kiyai didn’t not have same opinions in view of Madura expansion plan. There were differences of opinion that agree and disagree about the time of Madura province plan. Most of Kiyai had opinion that Madura still not ready to get expansion because of its natural resources and human resources. That condition caused the plan just still as a discourse.

Keywords: Madura province, Kiyai, Opinion

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: bustanolhusein@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia pasca reformasi memiliki ruh baru dalam soal pengelolaan kenegaraan yakni tentang kebijakan desentralisasi. Kebijakan yang mengakhiri sikap dominan pemerintah pusat dan sebagai upaya demokratisasi Negara Indonesia. Kebijakan desentralisasi yang berlaku di Indonesia mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 merupakan salah satu dari substansi perubahan yang dihembuskan pada era reformasi. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, dengan demikian daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan (Rasyid, 2003: 8). Efek dari kebijakan ini akan menghantarkan bagi pemerintah daerah untuk lebih bisa kreatif, inisiatif dan akhirnya akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah pusat kemudian bisa fokus sesuai tugas garapannya dan menjadikan efisiensi dan efektifitas pemerintahan nasional.

Otonomi daerah hadir untuk membebaskan daerah dalam partisipatif utuh. Partisipasi yang menyetarakan dan memiliki semangat bergotong royong. Ryaas Rasyid juga mengemukakan bahwa visi otonomi daerah dalam bidang politik, yakni otonomi daerah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami proses untuk membuka ruang lahirnya kepala pemerintahan secara demokratis (Rasyid, 2003: 10). Pandangan demikian memiliki dampak bahwa adanya mekanisme transparansi publik dalam setiap agenda pemerintahan sehingga memiliki tarikan dari demokratisasi yang menjadi kehendak bersama. Selain itu, otonomi daerah hadir untuk memberi kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Konsekuensi dari kebijakan desentralisasi menyuburkan banyak usulan pemekaran wilayah yang diprakarsai oleh elit lokal. Pemekaran wilayah dianggap sebagai usaha untuk mengefektifkan pembangunan daerah dengan memaksimalkan potensi daerah tersebut. Jelas alasan demikian masih banyak yang memperdebatkannya, karena tidak sedikit wilayah yang sudah dimekarkan ternyata mengalami nasib buruk, yakni kegagalan

pembangunan (Kompas, 2012). Kegagalan tersebut juga diangkat oleh kalangan akademisi yang menuntut adanya perubahan undang-undang tentang prasyarat pemekaran Madura. Evaluasi lainnya dari kebijakan pemekaran wilayah adalah belum adanya kejelasan rencana jangka panjang konkrit dari inisiator pemekaran tersebut dan kelemahan transparansi-akuntabilitas pemerintah daerah pasca pemekaran (Ratnawati, 2008).

Dewasa ini, pemekaran menjadi virus yang menular sangat cepat ke seluruh Indonesia. Reformasi bagi elit lokal memberi kesempatan untuk berdiri tegak dan menganggap memiliki *bergaining position* yang lebih di mana pusat yang terlihat lemah. Ada fenomena daerah setelah adanya kebijakan otonomi daerah yang kemudian membuat lokal atau daerah percaya diri untuk berkreasi sesuai keinginannya masing-masing karena pada Orde Baru hal demikian dibatasi oleh pusat. Hal ini diibaratkan seperti keran yang lama tertutup kemudian terbuka bebas, maka muncrat segala keinginan.

Isu pemekaran sampai juga akhirnya pada Madura. Rencana pemekaran Madura sebagai provinsi sebenarnya berhembus sejak tahun 1999, yakni pada masa Abdurrahman Wahid yang lebih akrab disapa Gusdur sebagai presiden yang menggantikan Habibie. Isu pemekaran diawali oleh masyarakat luar Madura, yakni Prof. Dr. Ryaas Rasyid yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Otonomi Daerah. Pasca itu terjadi beberapa kali pertemuan untuk membahas rencana pemekaran Madura sebagai provinsi di beberapa tempat di Madura. Setiap pertemuan masih belum bisa memberikan rekomendasi secara teknis untuk ditindaklanjuti dalam ranah aksi. Pertemuan tersebut sebagian besar diinisiasi oleh Gerakan Kiyai, yakni organisasi Masyarakat BASSRA (Badan Silaturahmi Masyarakat Madura). BASSRA memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menggerakkan isu rencana pemekaran Madura menjadi provinsi. Sejak awal BASSRA yang mengawali wacana pemekaran Madura. Hal demikian disampaikan oleh Kiyai Fadhal sebagai berikut :

“.....yang menggagas waktu itu BASSRA. Waktu itu kan ketuanya Kiyai Tijani Sumenep. Sebagai kordinator pusat BASSRA. Kalau sekarang Kiyai Mohammad Rofii. Rupanya sekarang sudah adem ayem untuk dibicarakan.

Kalau saya sejak dahulu sesuai dengan kekhasan Madura sangat sepatutnya untuk mendirikan propinsi.....”

Akhir 2011, isu pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi kembali digulirkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, yakni KH. Busyro yang terpilih sebagai Bupati Sumenep pada 2012. Beliau menyetujui pemekaran Madura menjadi provinsi dan telah menyiapkan pemekaran Kabupaten Sumenep, dimana Kepulauan Kangean akan dijadikan kabupaten baru yang kemudian untuk melengkapi syarat administrasi pemekaran yaitu minimal terdapat lima kabupaten di provinsi tersebut (<http://tempointeraktif.com//Bupati-Sumenep-Ingin-Madura-JadiProvinsi.html> diakses pada 31 Maret 2012).

Usulan Bupati Sumeneo menjadi jawaban konkrit dari salah satu persoalan administrasi yang mempengaruhi kesiapan Madura sebagai provinsi (<http://www.kabarMadura.com//pemkab-sumenep-rencanakan-dua-pemekaran-desa.html> diakses pada 28 Maret 2012). Sebelumnya sejak era reformasi hingga sekarang wacana pemekaran mengalami kembang-surut dalam semangat bersama membangun Madura. Usulan tersebut dianggap memudahkan tahapan awal persyaratan administrasi menuju pemekaran wilayah. Selanjutnya belum ada tanggapan positif dari kiyai untuk membahas kembali rencana pemekaran ini. Reaksi kosong terjadi di masing-masing kabupaten dalam menanggapi usulan Kabupaten Sumenep. Padahal kiyai Madura memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam memutuskan rencana itu. Dan yang memang merespon wacana ini di awal adalah golongan kiyai, akan tetapi hingga kini, belum ada keputusan bersama dari seluruh kiyai mengenai rencana tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan bagi penulis. Berarti ada ketidakberesan dalam dinamika yang terjadi terutama dari kalangan kiyai dimana selama ini kiyai Madura dikenal kompak. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti apa yang terjadi sebenarnya. Permasalahan penelitian ini mengenai bagaimana kronologi rencana pemekaran Madura menjadi provinsi dan tentang opini kiyai Madura terhadap rencana pemekaran Madura menjadi Provinsi. Manfaat penelitian ini, peneliti ingin memberi

sumbangsih akademis pada pemerintah daerah Madura dan tentunya masyarakat Madura untuk kedepan bisa merencanakan Madura yang lebih baik dan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi kepada akademisi lainnya jika ingin meneliti hal yang sama.

Tinjauan Pustaka

Teori Elit

Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan politik suatu wilayah berada pada elit politik. Menurut Laswell, Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Menurut para teoritikus politik, Elit Politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam sistem politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga negara. Dalam sistem politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa. Menurut Mills, bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Suzzane Keller (1984) mengungkapkan bahwa elit yang berpengaruh dalam kondisi masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogonitas disebut elit strategis. Dalam kondisi modern, elit strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, kiyai dianggap sebagai elit strategis sebagai orang yang memiliki kemampuan rohaniah/religiusitas yang tinggi dibanding masyarakat yang lain sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya.

Untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik: (1) Metode Posisi. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok

kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat; (2) Metode Reputasi. Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat; (3) adalah Metode Pengaruh. Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan menaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Ketiga metode penentuan elit tersebut diakui dan dianut oleh berbagai negara. Namun ada negara yang dominan menggunakan metode posisi atau metode reputasi. Disamping itu ada juga negara yang mengkombinasikan ketiga metode tersebut untuk memperoleh hasil yang sesuai dalam mengkategorikan mereka yang tergolong sebagai elit politik

Konsep Kiyai

Bila dilihat dari aspek sosio-kultural, kiyai di Madura mempunyai peran penting dalam masyarakat. Di antara peran sosio-kultural yang paling dominan yaitu sebagai pemimpin keagamaan dan ustadz yang mengajarkan agama Islam kepada santri dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sebagai pemuka agama Islam, mereka seringkali menjadi pemimpin ritual keagamaan, seperti selamatan (slamétan), membaca tahlil, sholawat narîyah, dan membaca manaqib (Zamroni, 2012).

Berdasarkan peran sosio-kultural keagamaannya, kiyai dapat digolongkan sebagai kelompok elit dalam komunitas masyarakat muslim. Kemunculan kiyai sebagai elit sosio-kultural dalam masyarakat sangat terkait dengan wacana dan praktik islam yang disebarkan melalui jaringan ulama atau kiyai. Jika ditelusuri lebih jauh, jaringan ulama di Madura bahkan juga di Indonesia secara keseluruhan mempunyai hubungan erat dengan ulama Timur Tengah (Zamroni, 2012). Percampuran nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat pesisiran Madura turut mewarnai corak keislaman masyarakat yang ada. Bertolak belakang dengan segala rupa organisasi,

birokratis, jabatan, struktur kharismatik tidak mengenal suatu bentuk atau prosedur pengangkatan maupun pemecatan yang tertata, ia tidak mengenal karir, kenaikan pangkat, maupun gaji (Zamroni, 2012).

Kepemimpinan yang kharismatik sering diidentikkan dengan irrasionalitas, tidak dapat diprediksi, dan kreatifitas yang melekat pada seseorang (Zamroni, 2012). Kekuatan kharisma ini tercermin pada manifestasi pengaruh sosial sesosok individu di tengah masyarakat dan tidak bisa diturunkan kepada sembarang anak turunnnya, karena mempunyai kualifikasi tertentu yang bersifat mistik dan sulit dijangkau dengan akal rasional. Hampir di seluruh kepulauan Madura, kiyai tidak hanya mempunyai kekuasaan secara kultural, akan tetapi juga mempunyai kekuasaan struktural, seperti jabatan dalam pemerintahan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) maupun Bupati. Dengan demikian, kekuatan kharismatik yang dimiliki oleh kiyai melalui pengaruh sosio-kultural akan semakin lengkap dengan adanya penguasaan terhadap kekuatan struktural yang dimilikinya (Zamroni, 2012). Kondisi ini tidak hanya dapat menciptakan praktik hegemoni melalui otoritas moral keagamaan yang dimiliki oleh kiyai, tetapi juga lebih dari itu, akan mematikan tumbuh berkembangnya dinamika elit lokal. Lewat kekuasaan, kiyai dengan leluasa melakukan dakwah keagamaan dan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat.

Dalam praktiknya tipologi kiyai juga beragam. Pertama, terdapat kiyai yang memiliki keahlian untuk mengobati orang secara tradisional, dengan menggunakan bacaan maupun ritual-ritual tertentu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita orang yang bersangkutan. Mereka sering menyebutnya sebagai kiyai dhukon (Zamroni, 2012). Terkadang mereka disebut dengan dhukon saja dan tidak dianggap sebagai orang yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Oleh karena itu, kiyai dan dhukon bisa dianalogikan dengan santri dan abangan, meskipun tipologi tersebut agak kabur karena kiyai dan dhukon tidak bisa dipisahkan secara langsung. Kedua, terdapat juga sebutan kiyai politik, yakni seorang pemuka agama Islam yang sudah diakui oleh masyarakat Madura. Namun yang bersangkutan juga terlibat dalam politik praktis bahkan juga menjadi

pemimpin partai politik. Ketiga, kiyai pengusaha, seorang kiyai yang sekaligus menguasai berbagai usaha bisnis yang dijalankannya.

Keempat, kiyai khusus yakni seorang kiyai yang diakui oleh masyarakat sebagai orang yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang luas, namun mereka tidak terlibat dalam praktik perpolitikan dan tidak pula menekuni bisnis tertentu. Karakter kiyai yang terakhir ini biasanya lebih kharismatik dibandingkan dengan kiyai yang lain. Di samping karena trah (keturunan), kharisma kiyai muncul karena sifat *tawadu* dan *wara* yang dianggap mampu memberikan pencerahan spiritual berupa *karômah*, suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang pada umumnya (Zamroni, 2012). Masyarakat awam meyakini bahwa *karômah* merupakan pemberian dari Allah. *Tawadu'* dan *wara* merupakan unsur utama dalam kepemimpinan pesantren. Hampir setiap kiyai pemilik pesantren besar yang ada di Madura masih mempunyai hubungan kekerabatan. Bahkan, beberapa putra kiyai menyebar luas di pulau Jawa dan luar Jawa, seperti Situbondo dan Kalimantan.

Di Madura, elit kiyai Madura ternama membentuk organisasi masyarakat yakni Badan Silaturrehimi Masyarakat Madura yang disingkat BASSRA. Ormas ini sangat disegani oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu buktinya adalah ketika persetujuan pembangunan Suramadu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus melobi BASSRA. Selain itu seringkali BASSRA diundang ke Jakarta untuk dimintai pendapat atas kasus-kasus keummatan, salah satunya kasus Ahmadiyah.

Organisasi ini dipandang netral dan bebas dari intrik politik. Seluruh kiyai yang tergabung di organisasi ini memiliki hubungan darah. Hal demikian yang membuat akrab dan mengurangi konflik sesama Kiyai. Diantara Kiyai besar yang masuk dalam BASSRA adalah Kiyai Mohammad Rofii dari Banyuwangi Pamekasan, Kiyai Fauzi Tijani dari Al-Amin Prenduan Sumenep, Kiyai Dovyer syah dari Darussalam Torjun Sampang dan Kiyai Fuad dari Saykhona Kholil Bangkalan.

Konsep Opini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Opini memiliki arti pendapat; pikiran; pendirian; politik pendirian atau pandangan

politik; pendirian berdasarkan ideologi atau sikap politik. Selain itu makna dari opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian, dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan misalnya menurut pembuktian melalui induksi (<http://id.wikipedia.org/wiki/Opini> diakses 20 Januari 2013). Dalam hal ini penulis memandang bahwa istilah opini lebih relevan untuk dijadikan sebagai istilah yang menggambarkan pendapat kiyai melalui kacamata politik sehingga sesuai dengan tujuan dari peneliti yang menggunakan pendekatan politik dalam memahami fenomena kasus yang diteliti.

Prosedur Menuju Provinsi

Perundang-undangan tentang pembentukan daerah terdapat persyaratan syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administratif tersebut untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Widjaja, 2005: 157). Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah sosial budaya, sosial politik, pendudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Faktor lain yang dimaksud antara lain pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan kabupaten dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan sarana pemerintahan (Widjaja, 2005: 158).

Hasil studi dari tim bank dunia menyimpulkan adanya empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu: (1) Moto untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan ketertinggalan pembangunan; 2)

Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan dan lain-lain ; 3) Adanya kemandirian fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakan dana alokasi umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakan sumber-sumber pendapatan asli daerah/PAD); 4) Motif pemburu rente para elit. Disamping itu masih ada satu motif tersembunyi dari pemekaran daerah, yang oleh Ikrar Nusa Bhakti disebut sebagai *Gerry-mander*, yaitu usaha pembelahan/pemekaran daerah untuk kepentingan parpol tertentu. Contohnya adalah kasus pemekaran Papua oleh pemerintahan Megawati (PDIP) dengan tujuan untuk memecah suara partai lawan. Sejumlah permasalahan di bawah ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor tersebut (Ratnawati: 2010). Beberapa contoh permasalahannya :

1. Konflik dengan Kekerasan. Terjadi di kabupaten Polewali-Mamasa yang dimekarkan pada 2002 menjadi kabupaten Polewali Mandar.
2. Menurunnya Jumlah Penduduk dan PAD Secara Drastis. Terjadi di kabupaten Aceh Utara dimana terjadi penyusutan penduduk dan PAD daerah akibat migrasi ke kota lainnya.
3. Menyempitnya Luas Wilayah dan Beban Daerah Induk. Kabupaten Halmahera Barat yang setelah pemekaran wilayahnya menyempit secara drastis. Saat ini dibebani oleh pembiayaan daerah-daerah baru di Kab. Halmahera Utara dan Kepulauan Sula.
4. Perebutan Wilayah dan Masalah Ibu Kota Pemekaran. Kasus ini terjadi misalnya antara Pemda Kampar dan Pemda Rokan Hulu yang memperebutkan tiga desa yaitu tandun Aliantan dan Kabun
5. Perebutan Aset. Kasus ini terjadi di kabupaten Nunukan yang dimekarkan pada tahun 1999 yang kemudian berebut gedung dan peralatan dengan kabupaten induknya.

Prosedural Kelembagaan

Secara yuridis formal, undang-undang No. 32 Tahun 2004 masih mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui yaitu: Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kedua, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali (Ratnawati: 2010).

Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik Pemda dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemda. Usulan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari gabungan Kabupaten/kota di Provinsi baru dan dapat dibantu oleh APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari kabupaten/kota yang baru dibentuk (Ratnawati: 2010). Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai pada penghapusannya didahului dengan penilaian kerja. Apabila setelah lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya tidak mencapai hasil maksimal, maka daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain.

Selanjutnya dilihat dari prosedur pemekaran, studi kelayakan daerah pemekaran oleh pemda pengusul sebaiknya direvisi supaya lebih objektif. Penelitian dan penyusunan proposal pemekaran harus dilakukan oleh tim ahli yang kredibel dan independen dari mulai stakeholder. Disamping itu perlu dibongkar dengan mengganti pejabat di dalamnya dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Ini untuk mengubah domain pemekaran dan wilayah

politik dan lobi-lobi, menjadi domain publik yang netral dan rasional yang dijauhkan dari politik dagang sapi dan konspirasi elit daerah dan pusat (Ratnawati: 2010).

Hubungan Pusat dan Daerah

Dalam Praktik istilah yang tepat yang bisa digunakan untuk istilah terkait adalah *national polity* dengan *local polity* (2003: 27). Menjadikan pisau analisa marxis dan liberalis dalam usaha penerjemahan dari hubungan pusat dan daerah. Upaya mengutamakan objektivitas terminologi, sebaiknya menggunakan istilah *polity*. Maknanya menjadi lebih luas dan mencakup isu berbagai macam hal, misalnya isu nasionalisme dan *nation building*. Jika kita menggunakan kaca mata dari marxis, maka jelas bahwa sejatinya pusat dan daerah merupakan institusi kapitalis yang sama-sama menyedot darah masyarakat. Hanya berbeda pada eselon tetapi tetap sama memiliki prinsip sebagai penguasa. Dalam hal ikhwah demikian, kalangan liberalis lebih positif dan optimis dengan memandang bahwa ketika ada otonomi daerah yang kemudian memiliki efek desentralisasi kekuasaan pada daerah, dianggap akan memberi nuansa demokratis yang cukup kuat, karena jelas daerah dianggap lebih dekat dengan masyarakat, tentunya ada bentuk partisipasi masyarakat yang riil.

Sifat relasi pusat-daerah, cara pandang sentralistik yang cenderung hirarki dan dominatif dan melihat daerah sebagai subordinatif semestinya ditinggalkan oleh pemerintah (Haris, 2003: 74). Hal demikian sesuai dengan semangat dan amanah reformasi untuk demokratisasi Pusat dan daerah. Kedepannya ada harmonisasi dengan penataan kembali hubungan pusat dan daerah. Hal ini kemudian memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki cara pandang terhadap otonomi daerah yakni kontrak (Haris, 2003). Hubungan ini memiliki kesetaraan, saling bergantung dan bersifat kesepakatan.

Pembahasan

BASSRA sebagai wadah silaturahmi Kiyai Madura, oleh sebagian besar ulama, dianggap sebagai pihak yang *concern* sejak awal dan serius untuk menindaklanjuti pemekaran Madura menjadi provinsi. Menurut Kiyai Nailur,

yang menghembuskan dan menyebarkan rencana pemekaran Madura menjadi propinsi merupakan dari pihak BASSRA. Jelas sekali kiprah BASSRA sebagai wadah silaturahmi hampir seluruh elit kiyai ternama di Madura.

Kronologi

1998-1999 - Orde Baru runtuh diganti oleh Era Reformasi.-

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Desentralisasi/Otonomi disahkan oleh Pemerintah Habibie.

1999-2001 Abdurrahman Wahid menggantikan posisi Habibie sebagai Presiden Indonesia.- Menteri Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid mengundang tokoh Madura terutama Kiyai BASSRA ke Jakarta untuk silaturahmi.- Ryaas Rasyid mengusulkan untuk Madura menjadi Provinsi karena memiliki kesempatan besar.- Isu kemudian menyeruak di kalangan Ulama BASSRA.- Sepulangnya dari Jakarta, ulama menginisiasi untuk mengadakan seminar dan lokakarya di Universitas Bangkalan dengan tema Menyongsong Otonomi Daerah.-

Selanjutnya pertemuan di Pondok Pesantren Saykhona Kholil Bangkalan untuk membicarakan secara teknis pemekaran Madura.- Ternyata pembahasannya masih belum bisa dibahas secara intensif karena masih bahasan pada soal persyaratan teknis menjadi provinsi.

2001-2010. Pada 2001, ulama kembali menginisiasi pertemuan di Pondok Al Amien Prenduan Sumenep dihadiri oleh gubernur Jawa Timur, Imam Utomo.- Imam Utomo bersikap demokratis dengan menyerahkan semua pada masyarakat Madura terhadap rencana pemekaran Madura.- Ulama Madura mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri terkait keseriusan Madura menjadi provinsi.-

2004-2009, Ulama Madura *concern* pada rencana pembangunan Suramadu dan menggeser prioritas rencana provinsi Madura.- Pada 2007, diadakan musyawarah nasional di JW Marriot dalam pembahasan tindak lanjut Madura menjadi provinsi.- Pada 2008, Ulama Madura menyelenggarakan deklarasi serambi Madinah di Sampang yang mengerucut tentang pembahasan provinsi Madura.- Ulama Madura fokus pada pengawasan dan pembangunan Suramadu.- Pak Karwo sebagai Gubernur Jawa Timur kurang yakin

dengan pemekaran Madura akan mampu menyejahterakan masyarakat Madura- Tokoh Madura di luar Madura, kurang mendukung rencana pemekaran wilayah Madura menjadi Provinsi- J e m b a t a n Suramadu selesai dibangun pada 2009- 2010, diselenggarakan halal bihalal yang mempertemukan elit kiyai, tokoh Madura professional yang kemudian membahas tim berdasarkan kapabilitas.- Muncul isu di nasional bahwa pemekaran di berbagai daerah dinilai tidak berhasil

2011-2012. Pada 2011, Bupati Sumenep, KH Busro memberi pernyataan tentang kesiapan Sumenep untuk dimekarkan menjadi kabupaten Kangean dan kabupaten Sumenep- Akhir 2012 tokoh Ali Badri mengungkapkan secara keras di media Surabaya, tentang kesiapan Madura menjadi provinsi.- A k h i r 2012, Pak Karwo kembali mempertanyakan kesiapan Madura dengan menanyakan PAD Madura- Pemekaran wilayah di Indonesia banyak yang mengalami kegagalan (Kompas, 2012).- Pemerintah sekarang melakukan proses penyempurnaan peraturan pemekaran wilayah.- Kiyai Madura adem ayem menanggapi isu yang terlontar di media

Rencana pemekaran Madura sebagai Provinsi sebenarnya berhembus sejak tahun 1999, yakni pada masa Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang menggantikan Habibie. Isu pemekaran ini sebenarnya diawali oleh masyarakat luar Madura, yakni Prof. Dr. Ryaas Rasyid yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Otonomi Daerah. Beliau mempertanyakan mengenai keinginan Madura menjadi Provinsi kepada ulama dan elit Madura yang pada satu kesempatan berkunjung ke kantor kementerian pada saat itu. Hal itu kemudian mendapat respon positif dari rombongan tersebut untuk segera menindaklanjuti usulan dari Pak Menteri dengan mengadakan Semiloka dengan tema bertajuk "Madura Menyongsong Otonomi Daerah" yang diadakan di Universitas Bangkalan (sekarang menjadi Universitas Trunojoyo). Semiloka dibuka oleh Prof.Dr. Ryaas Rasyid dan kemudian Prof. Yusril yang menutup Semiloka tersebut. Hal ini kemudian menjadi awalan dari wacana pemekaran wilayah sebagai provinsi

Selanjutnya Menteri Otonomi Daerah kemudian melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan ulama/kiyai se Madura di

Pondok Pesantren Saykhona Kholil. Dalam dialog tersebut Menteri menanyakan kembali keseriusan dari internal Madura untuk pemekaran Madura sebagai Provinsi. Beliau kemudian memberi saran kepada elit pemerintah daerah Madura untuk segera mengirim surat ke pemerintah pusat perihal pemekaran Madura. Dengan demikian maka nantinya akan terbentuk dua tim yang terdiri dari tim pertama beranggotakan dari pemerintah pusat yang fokus pada persiapan administratif pemekaran Madura. Tim yang kedua merupakan elit politis pusat dari DPR untuk kemudian meninjau secara politis keinginan elit politik kabupaten di Madura terkait rencana pemekaran tersebut.

Silaturahmi membahas pemekaran Madura kemudian digulirkan di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, perwakilan elit pemerintah dan elit politik, ulama, mahasiswa masing-masing kabupaten di Madura kecuali Sampang. Dalam dialog ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Imam Utomo menyikapi rencana ini dengan demokratis. Beliau menyerahkan kembali kepada masyarakat Madura untuk menentukan masa depannya sendiri dengan tetap harus melakukan pengkajian mendalam terhadap rencana ini

Selepas dialog tersebut, rencana ini hanya sebatas wacana di masing-masing kabupaten. Masing- masing elit dan ulama sering memberi pernyataan yang juga sebatas asumsi dan usulan. Pertemuan diadakan tanpa adanya konklusi konkrit dan riil. Hal ini kemudian terjadi hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jawa Timur di nahkodai oleh Soekarwo. Perlahan isu ini kian meredup terutama dari internal Madura sendiri dan di luar itu, sikap pemerintah provinsi Jawa Timur yang juga enggan melepas Madura dan resisten menolak isu pemekaran di Jawa Timur.

Dalam rentang waktu 2001-2010, para ulama lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengawasi jalannya pembangunan Suramadu, karena jelas muncul konflik dan perdebatan yang menguras tenaga bagi ulama, agar pembangunan Suramadu sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satunya adalah soal disetujui atau tidaknya Suramadu yang membutuhkan banyak waktu.Hal tersebut membuat para ulama sedikit melupakan tentang

wacana provinsi Madura yang isunya mulai membeku. KH. Nailur menyatakan :

“...ya masih belum. Ya ini masih wacana, belum ada pertemuan kelanjutan. Sekarang masih focus pada Suramadu dan bagaimana perkembangannya. Karena memang Suramadu perlu diawasi. Kalau sudah kami anggap aman, kita akan melangkah ke soal pemekaran Madura”

Pada tahun 2007, diadakan kembali musyawarah besar III masyarakat Maduran se Indonesia di J.W. Marriot yang kemudian kembali membahas persiapan pemekaran Madura sebagai Provinsi. Akan tetapi musyawarah tersebut tidak secara konkrit berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Dalam hal ini gubernur Jawa Timur 2008-2013, menolak gagasan pemekaran wilayah Madura, yang dianggap bukan menyelesaikan masalah akan tetapi menambah masalah baru dengan kondisi Jawa Timur yang sangat kondusif hingga saat ini. Menurut Pemerintah provinsi, pemekaran hanya kian menambah beban daerah dan pada akhirnya daerah yang tidak memiliki fundamental yang dalam sisi ekonomi maka kebijakan pemekaran tersebut seperti layaknya bunuh diri (<http://www.harianbhirawa.co.id/opini/23864-pemekaran-propinsi-hanyamembuat-masalah-diakses-25-Maret-2012>). Menurut gubernur, lebih baik selanjutnya fokus pada pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pembangunan di masing-masing daerah di Madura serta tetap menjadikan Badan Kordinasi Wilayah (BAKORWIL) sebagai sarana penghubung daerah terhadap pusat.

Selanjutnya menurut Kiyai Masud dan kiyai Fadholi pada tahun 2008 kembali ulama menginisiasi pertemuan untuk membahas tindak lanjut rencana pemekaran Madura. Pertemuan tersebut membahas mengenai keistimewaan Madura, yakni serambi Madinah. Berikut menurut Kiyai Fadholi :

“...Kalau wacana memang sudah lama, dulu kan ada deklarasi Sampang tentang Serambi Madinah. Ketika berbicara tentang serambi Madinah, maka akan terkait dengan keistimewaan Madura. Kalau sudah istimewa kan pantas untuk menjadi provinsi. Sudah ada itu deklarasi Madinah pada 2008. Yang menggagas waktu itu BASSRA. Waktu itu kan ketuanya Kiyai Tijani Sumenep. Sebagai

kordinator pusat BASSRA. Kalau sekarang Kiyai Mohammad Rofii...”

Hal tersebut kembali memiliki hasil nihil karena tidak terbentuk tim khusus yang selanjutnya menjadi garda terdepan untuk mempersiapkan Madura menjadi Provinsi. Dan pasca pertemuan deklarasi serambi Madinah, terdapat pertemuan halal bihalal terbatas yang diikuti oleh tokoh di luar Madura dengan pembahasan teknis mengenai pemekaran Madura. Kiyai Masud mengemukakan bahwa:

“.....Dua tahun lalu, 2010, ada pertemuan pada rangka halal bihalal. Usulan dari perantaraan untuk dibentuknya provinsi Madura. Lontaran tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim profesional yang mengadakan pertemuan secara rutin. Ada dari tokoh hukum, tokoh ekonomi, kelautan dan juga tokoh pendidikan.....”

Halal bihalal pada 2010, diharapkan menjadi tindak lanjut yang positif dikarenakan akan disusun jadwal rutin pertemuan secara teknis membahas pemekaran Madura, dengan mengelompokkan kaum profesional. Akan tetapi hingga hari ini belum terwujud tindak lanjut dan kembali kosong. Hal demikian menjelaskan bahwa belum ada pihak yang fokus secara kuat untuk mengawal isu tersebut.

2012, muncul kembali isu yang digulirkan oleh tokoh Madura, Ali Badri. Beliau menyatakan bahwa Madura sudah siap untuk dimekarkan. Dalam (<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=2> diakses pada 30 Desember 2012), Pak Karwo menanggapi sebagai berikut:

“.....Pemerintah Provinsi mempersilakan kabupaten/kota mengusulkan pemekaran menjadi provinsi sendiri. Pemprov tidak pernah menghalang-halangi pembentukan beberapa daerah menjadi suatu provinsi baru yang terpisah dari Jawa Timur. Silakan saja ada pemekaran, saya tidak melarangnya. Meski menyetujui, tetapi pada prinsipnya Pemprov Jatim ragu kemampuan daerah dalam membiayai operasional pemerintahan. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota yang mengusulkan pembentukan provinsi sangat minim sehingga dikhawatirkan tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.....”

Selanjutnya dalam (<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=2> diakses pada 30

Desember 2012) Dirjen Otonomi Daerah, Djoehermansyah Djohan ikut bersuara sebagai berikut;

“.....Provinsi Jatim tak perlu dimekarkan. Masih cukup baik sebagai satu provinsi. Dalam desain besar pemekaran provinsi nasional, Jatim juga tidak termasuk sebagai daerah yang akan dimekarkan. Sebab, sebagai satu kesatuan provinsi dianggap masih cukup efektif. Infrastruktur seperti jalan dan sarana komunikasi masih bagus....”

Sikap Pemprov dan Dirjen menunjukkan minimnya dukungan dari pihak eksternal Madura terkait rencana pemekaran Madura menjadi provinsi. Hal demikian mengisyaratkan bahwa dinamika eksternal cukup mempengaruhi dari wacan pemekaran tersebut.

Opini Kiyai Madura

Berdasarkan temuan penelitian oleh penulis dapat dinyatakan bahwa keseluruhan ulama sepakat untuk pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi, akan tetapi berbeda dari hal waktu realisasinya. Dalam hal ini Kiyai Fadholi berpendapat sebagai berikut :

“.....Opini kiyai sendiri mayoritas setuju, ya demi menjaga kekhasan Madura. Kekhasan itu soal sosial agama, Madura sangat terkenal sebagai pulau yang agamis kota santri dan sebagainya. kalau kiyai sendiri 90 % setuju, terutama BASSRA sebagai motor penggerak sejak awal tentang isu provinsi Madura.....”

Kiyai menyepakati tentang pemekaran Madura, akan tetapi mengenai waktu memiliki perbedaan pandangan. Oleh karena itu penulis membagi kedua sikap tersebut pada opsi Pro dan Kontra dengan menjadikan alasan waktu sebagai pembeda. Opsi pro menghendaki pemekaran wilayah diselenggarakan dalam jangka waktu dekat. Opsi kontra mengemukakan bahwa pemekaran Madura diselenggarakan setelah dianggap memiliki modal yang kuat terutama sumber daya manusia. Perbedaan pendapat tersebut, disebabkan oleh adanya polarisasi kiyai yang terjadi akibat dari kepentingan dalam BASSRA

dan perbedaan friksi politik yang memberikan nuansa kaku dalam perbincangan rencana pemekaran Madura. Padahal homogenitas dalam soal background ulama Madura yakni Nahdliyin. Sebaliknya, homogenitas tersebut luntur akibat perbedaan kepentingan politik yang menyertai Kiyai Madura. Penulis mendapati karakteristik unik dalam pengaruh background BASSRA tentang opini kiyai tentang pemekaran Madura. Penulis menemukan kecenderungan bahwa Kiyai yang aktif dalam kegiatan BASSRA lebih pro dengan rencanapemekaran wilayah. Jelas beberapa kiyai yang penulis temui dari kalangan pengurus BASSRA yang aktif menunjukkan semangat yang menyala-nyala tentang pemekaran Madura. Hal ini memang sedari awal tampak dari inisiasi rencana pemekaran wilayah yang memang digulirkan oleh ulama BASSRA Madura.

Tabel 2. Pemetaan Opini Pro Kiyai Madura

Perjuangan Kiyai	Alasan Pro
Background Pengurus BASSRA yang aktif	- Menjaga Kekhasan Madura - Historis keistemawaan Madura - Pasca Pembangunan Suramadu, disikapi dengan pemekaran wilayah - Pemerintah provinsi kurang fokus menangani Madura - Seluruh persyaratan menjadi Provinsi sangat mudah untuk diselesaikan

Sumber: Dari rangkuman wawancara kiyai Madura

Beberapa alasan yang menjadikan kiyai lebih pro dengan wacana ini terutama soal menjaga kekhasan Madura. Kekhasan Madura dalam soal Sosial agama dan budaya tidak bisa ditawarkan dengan apapun. Dalam hal ini Kiyai Nailur mengemukakan :

“.....Opini Internal kiyai terhadap rencana provinsi itu bagus karena akan terkontrol dengan sendirinya. Tidak ditangani oleh orang yang tidak mengenal Madura. Madura itu terkenal karena kekhasannya yang tersendiri. Ulamanya banyak, pesantrennya

banyak. Ya itu masya Allah Madura punya modal itu. Ya kembali lagi kita pantas untuk menjadi provinsi. Dengan begitu akan terfokus. Kalau se Jawa Timur, yakan itu terlalu banyak. Tidak fokus.....”

Kiyai menganggap bahwa dengan dijadikannya Madura menjadi provinsi, muncul kefokusannya yang penuh dari pemerintah provinsi untuk menjaga Madura dari serangan budaya luar. Selanjutnya Kiyai Nailur dan Kiyai Dovie yang sama-sama sebagai Kiyai yang aktif di BASSRA menganggap pentingnya pemekaran Madura sebagai berikut

“....Ya tujuannya untuk membentengi agama kita dengan maksimal. Contohnya pembangunan Suramadu aja bikin kita takut, apalagi menjadi provinsi sendiri. Yang baik-baik biasanya lambat masuk, tapi yang jelek-jelek mudah sekali untuk masuk. Dimana saja pun begitu, kalau kebaikan sulit, kalau kemudharatan mudah sekali masuk.,,,,”

“....Alasannya, dari segi budaya dan persamaan bahasa, orang Madura bukan keturunan etnis Jawa, tetapi etnis Melayu. Kedua, penemuan mutakhir di Madura ada banyak barang tambang yang belum tereksplorasi.....”

Jelas, ketika pemerintah merupakan asli warga Madura akan berpengaruh kuat dalam kebijakan mengenai persoalan sensitif seperti sosial dan budaya dalam pandangan kiyai. Dalam hal ini memang muncul sikap ego etnosentris, dengan lebih mengedepankan kedaerahan soal rencana pembangunan Madura kedepannya.

Alasan selanjutnya bahwa kenapa harus menjadi Provinsi, dikarenakan soal historis Madura yang dulunya merupakan sebuah kerajaan. Madura sejak dulu dikenal juga memiliki kekhasan dalam bahasa, dalam budaya, hingga bidang kuliner. Kiyai Fadholi mengungkapkan bahwa:

“....Secara sejarah dulu itu Madura Kadipaten. Di Pamekasan ada kerajaan yaitu Ronggo Sukowati. Ya itu raja Madura. Pas pada jaman Majapahit. Di jaman pra kemerdekaan, Madura sebagai Bakorwil Karisedenan. Dan pada waktu itu, Surabaya dan Gresik juga termasuk dari wilayah Karisedenan Madura. Makanya dulu pernah ada Gerbang Kertasusila. Faktor sejarah kita dari kerajaan, turun menjadi kadipaten, terus turun menjadi bekorwil. Jadi kita bisa menagih secara sejarah..”

Hal demikian mensejajarkan Madura

dengan Aceh yang memiliki keistimewaan sendiri. Disamping itu, sejak jaman kolonial Belanda, Madura dan Aceh merupakan wilayah yang ditakuti oleh penjajah dan sulit masuk untuk menguasai Madura terutama secara sosial, budaya dan keagamaan. Jelas ini bentuk dari sebuah kesolidan dan kekuatan masyarakat dan elit tradisional kiyai yang bersatu untuk menghadapi penjajah.

Rencana pembentukan provinsi Madura dianggap sangat memiliki momentum pasca dibangunnya jembatan Suramadu. Kiyai Nailur memberi pernyataan sebagai berikut :

“.....Pendapat orang luar, dengan adanya suramadu, berarti ada indikasi ada sesuatu di Madura. Tidak mungkin dibangun jembatan kalau tidak ada apa-apa di Madura. Kenapa tidak Bali sana. Dan kita tidak tahu, tapi sekarang sudah lumayan tahu.....”

Ada korelasi kuat dengan dibangunnya jembatan terpanjang se Asia Tenggara dengan kesiapan Madura menjadi provinsi. Karena ada perhitungan matang disitu tentang masa depan Madura yang cerah dilihat aspek dari ekonomi. Seluruh pihak Madura telah sadar bahwa Madura memiliki sesuatu yang bernilai besar dengan didirikannya Suramadu, tetapi data tersebut masih dimiliki pihak pusat. Opini Kiyai akhirnya skeptis dan kritis terhadap pusat, bahwa ada anggapan kuat Madura mau dijadikan objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Menurut Kiyai Hasbullah, seharusnya dengan dibangunnya jembatan tersebut akan berdampak pada pembangunan Madura yang khas budaya Madura yang berujung pada terbentuknya provinsi Madura.

Kiyai Fadholi menganggap bahwa seluruh persyaratan, seperti persyaratan administratif, persyaratan SDA dan sebagainya merupakan persyaratan yang mudah untuk segera dipenuhi. Terutama ketika kabupaten Sumenep melakukan pemekaran dengan membentuk kabupaten kepulauan Kangean yang kemudian menuntaskan persyaratan administratif, dimana minimal ada 5 kabupaten untuk membentuk provinsi. Pembentukan kabupaten baru tersebut memberikan angin segar dalam realisasi rencana pemekaran wilayah Madura.

Kiyai Fadholi mengemukakan bahwa:

“.... Pemekaran Madura akan mulus selama sudah memenuhi syarat, kan kemarin belum memenuhi syarat, terkait dengan jumlah administrasi kabupaten yang harus memenuhi

lima kabupaten. Sementara ini masih empat kabupaten. Jadi sebelum ada pemekaran Madura, harus ada pemekaran kabupaten terlebih dahulu. Yakni Kabupaten Sumenep yang bisa dimekarkan dan memang ada perbincangan kesana. Itu diupayakan terlebih dahulu, kalau sekarang diwacanakan itu bagus juga. Hal yang dibutuhkan segera adalah kesatuan pendapat dari masyarakat untuk kompak mengawal rencana pemekaran Madura....”

Pemekaran Kabupaten Sumenep menjadi dua Kabupaten yang akhirnya akan melengkapi syarat administrasi merupakan proses yang luar biasa untuk mengawal kembali momentum pemekaran wilayah Madura menjadi Provinsi. Hal demikian akan memicu kembali adrenalin para kiyai untuk segera merapatkan barisan dalam pembahasan Madura kedepan.

Soal pentingnya pemekaran Madura, Kiyai Fadholi tegas menyatakan:

“..... Faktor kesejahteraan yang diinginkan dari provinsi Madura, karena memang sejak awal Madura dimarginalkan oleh pusat sebelum adanya jembatan Suramadu. Kalau sekarang sudah ada peningkatan, dengan adanya Suramadu, transportasi lancar, dan pejabat Jawa Timur bisa datang ke Madura. Selanjutnya kedaulatan, yaitu menjadi tuan dirumah kita sendiri dengan bisa mengatur diri sendiri. Pendapatan juga akan besar dengan penambahan dana DAU sehingga sejajar dengan provinsi Jawa Timur. Tinggal kemauan bersama. Saya kira tidak perlu kata semua dari kata pihak. Tapi dari wacana tersebut dibentuk tim, misalnya badan perencanaan provinsi Madura (BP2M). Harus ada itu. Saya sejak awal sudah mewacanakan BP2M itu. Syarat administrasi gampang, syarat SDA saya pikir mampu, syarat SDA insya Allah juga mampu.....”

Pandangan Kiyai Fadholi mengisyaratkan tentang kekecewaan masyarakat Madura terhadap kinerja Pemprov dan Pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan tidak memperhatikan Madura secara optimal. Padahal dengan kondisi pembangunan Madura yang acapkali oleh pemerintah pusat dianggap wilayah tertinggal, seharusnya Madura mendapat perhatian lebih. Penilaian ini muncul juga dari sikap percaya diri ulama Madura yang memandang Madura cukup

Mandiri untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara orang Madura sendiri.

Kiyai dalam kelompok kontra cukup keras untuk menolak pemekaran Madura. Mereka menganggap bahwa usulan ini merupakan usulan bonek. Salah satu kiyai yang bersikap keras adalah Kiyai Zainal. Beliau menyebutkan bahwa usulan itu terlalu cepat dan kurang terencana. Bagi beliau, seharusnya ada desain yang jelas dalam rencana pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi. Ada kekhawatiran bahwa rencana ini hanya ikut-ikutan provinsi lain yang berhasil memekarkan diri. Padahal belum terbukti efektifitas dan keberhasilan pemerintah yang melakukan pemekaran.

Tabel 3. Pemetaan Opini Kontra Kiyai Madura

Perjuangan Kiyai	Alasan Kontra
- Background BASSRA yang tidak aktif	- SDM tidak siap - Kekayaan ekonomi belum tampak - Terlalu cepat untuk menjadi provinsi - Tidak ada dukungan dari tokoh Madura di luar Madura - Minim dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi - Belum ada kemauan bersama

Menurut Kiyai Nailurrahman, beliau mengemukakan bahwa sumber daya manusia Madura belum siap. Butuh waktu untuk menyiapkan manusia unggul yang akan mengelola Madura nantinya. Salah satunya usulan beliau adalah dibentuknya Institut Teknik Pesantren Madura. Dimana targetnya adalah menghasilkan manusia unggul dalam soal teknik tetapi berjiwa santri. Karena jelas, Madura identik dengan santri dan pesantren dan kedepannya diharapkan mereka yang akan membangun Madura. Kiyai Hasbullah menyatakan :

“.....Madura belum siap menjadi provinsi. Kita lihat saja dari sumber daya ekonomi dan manusianya. Dulu memang yang mengusulkan pertama kali pemekaran Madura itu dari BASSRA. Tapi saya tanyakan atas dasar

apa? Menurut saya Madura belum siap jadi jangan asal ikut-ikutan saja. Kita membentuk provinsi kan harus disiapkan SDM dan potensi ekonominya. Kalau daerah pantura seperti Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso mungkin bisa jadi provinsi. Kalau Madura yang terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, yang bisa diandalkan hanya Sumenep dan Bangkalan. Kalau Sampang, saya melihat seperti kota mati, masih masuk Daerah Tertinggal. Kedua terbawah juga Pamekasan. Jadi yang bisa kita diandalkan hanya 2 kabupaten, itupun tidak seberapa potensi ekonominya...."

Kemudian opini Kiyai Zainal tentang ketidaksiapan Madura menjadi Provinsi sebagai berikut :

".....Saya kira belum siaplah, SDM Madura belum siap. Jangan Bonek dengan usulan itu. Dulu kiyai BASSRA yang mengusulkan itu kan sistem "pokoknya". Jadi susah..sedangkan dari sisi pemikiran masih belum dan pandangan jauh ke depan juga belum ada. Hanya asal saja mengusulkan."

Pendapat Kiyai Hasbullah, memandang bahwa secara ekonomi Madura belum siap. Selain Kabupaten Sumenep dan Bangkalan, Kabupaten lainnya masih terlihat minim dalam penghasilannya. Bahkan masuk dalam kategori kabupaten yang memiliki penghasilan terendah di Madura. Ini bukan soal keterbatasan sumber daya alamnya. Tapi memang kualitas pengelolaan sumber daya alam yang tidak memiliki efek besar terhadap penghasilan daerah. Kembali lagi memang tidak ada desain terkait pembangunan di Kabupaten Madura. Terkesan bahwa ini memang tidak ada niatan kuat untuk membangun ekonomi Madura secara kuat. Penulis memandang beberapa kiyai Madura tidak percaya diri dengan langsung mempertanyakan kesiapan dari aspek ekonomi. Mereka menjadikan PDRB sebagai soal utama yang patut dicermati bahwa Madura belum memiliki pondasi yang kuat.

Menurut Kiyai Nailur, yang menjadi salah satu kekurangsiapan dari rencana provinsi Madura ini adalah opini tokoh Madura yang berada di luar Madura yang masih belum bulat untuk mendukung provinsi Madura. Malah ada isu bahwa memang tokoh Madura seperti Hartono dan Mahfud MD tidak menghendaki rencana ini. Beliau menganggap bahwa jelas

Madura masih belum siap apa-apa untuk menjadi provinsi.

".....Kita sudah punya rencana kesana. Karena bagaimanapun kalau Madura memang potensial sumber daya alamnya, mengapa tidak Madura menjadi provinsi. Tinggal tambah satu kabupaten lagi. Sudah ada rencana itu, tapi dihalang-halangi oleh kalangan luar Madura. Dan mereka meminta dukungan kepada orang yang ada diluar Madura..ya yang menjadi pejabat seperti Hartono, Mahfud. Mereka tokoh Madura yang berada diluar Madura. Dengan alasan di Madura masih belum ada apa-apa. Buktinya masih bannyak yang pergi keluar Madura untuk mengais rejeki. Jadi hal demikian dianggap Madura belum siap secara ekonomi....."

Pandangan Kiyai Nailur tentang tokoh Madura yang berada di luar Madura, tentang belum adanya dukungan total dari tokoh Madura:

".....Nampaknya karena belum siap. Mungkin nanti juga sepakat kalau memang sudah siap. Karena itu bagian kebanggaan dari dirinya sendiri. Kalau ngebet menjadikan provinsi, kalau sudah jadi, tapi memang belum siap akhirnya terbengkalai juga. Sementara sekarang belum terwujud kekayaan, masih katanya-katanya. Kalau sudah terwujud bahwa Madura memiliki kekayaan, ya kita akan memiliki kekuatan....."

Hal ini jelas memperkuat bahwa secara dukungan psikologis apalagi teknis belum ada dari tokoh nasional yang merupakan asli Madura. Tokoh Madura dinilai bersikap dingin atas rencana Madura menjadi provinsi. Alasannya adalah faktor ketidak siapan Madura dari berbagai sisi. Sikap tersebut dikecewakan oleh kiyai Madura dimana memang jalinan komunikasi antara tokoh Madura yang ada di luar dengan elit local Madura masih kurang kuat.

Selain itu, jelas ada penolakan dari pemprov Jawa Timur yang disampaikan langsung oleh gubernur Soekarwo, pasca pembangunan suramadu terkait pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi. Pemprov menganggap Madura tidak memiliki modal yang cukup untuk mmengurusi diri senndiri sebagai provinsi. Terutama dari sektor ekonomi yang sangat lemah

Kesimpulan

Dalam penelitian wacana rencana pemekaran Madura menjadi provinsi, penulis menyimpulkan bahwa Kronologi rencana pemekaran Provinsi Madura pada rentang waktu 2002-2009 menunjukkan bahwa Kiyai lebih memprioritaskan pengawalan, dan pengawasan pembangunan Suramadu sehingga cenderung sedikit melupakan tentang wacana provinsi Madura. Penulis berpandangan bahwa kini wacana rencana pemekaran provinsi kehilangan momen untuk dibahas secara mendalam. Selanjutnya, Kiyai Madura tidak memiliki opini yang sama dalam menyikapi rencana pemekaran Madura menjadi Provinsi. Satu sama lain saling berbeda dalam menyatakan alasan dan belum memiliki persepsi yang sama tentang pembangunan Madura kedepannya. Hal ini karena adanya polarisasi kiyai Madura akibat dari perbedaan pada kepentingan BASSRA dan politik. Kemudian, Kiyai Madura dalam beberapa kurun tahun terakhir, lebih sibuk pada urusan politik pada masing-masing kabupaten dan fokus dalam pengawasan Suramadu. Dampaknya adalah isu rencana pemekaran ini menjadi basi dan tidak ada kembali niatan untuk menginisiasi pertemuan. Wacana ini akan terus menjadi wacana ketika memang tidak ada yang memelopori secara formal untuk dibentuknya tim persiapan provinsi Madura. Dalam hal opini Kiyai menunjukkan adanya sikap kedaerahan terhadap alasan Madura menjadi provinsi. Hal tersebut lumrah karena sedari awal hubungan pusat dan daerah Madura sendiri masih belum harmonis. Komunikasi dua arah dan setara masih belum ada untuk dilaksanakan. Hal itu pun juga berlaku dari hubungan Pemprov Jawa Timur dan Madura, yang hingga hari ini belum ada pembicaraan bersama serius terkait rencana Madura kedepan. Melihat keseluruhan dengan beragamnya opini kiyai tentang rencana pemekaran ini tetap menghendaki pada suatu saat Madura wajib menjadi provinsi dan semuanya hanya persoalan waktu kesiapan. Kiyai memiliki pengaruh cukup kuat dalam pengkondisian isu dan rencana pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi. Ketika kiyai kompak dan satu suara, maka rencana tersebut akan segera menjadi nyata

Saran

Kepada pemerintah semestinya merevisi

kembali aturan main mengenai pemekaran wilayah. Evaluasi pemekaran wilayah yang sudah berlangsung cukup menjadi data empiris sebagai penyempurna aturan. Hal demikian akan memberi efek objektifitas bagi wilayah yang akan berencana untuk memekarkan wilayah supaya berpikir kuat. Sebagai peneliti dan warga asli Madura, peneliti menganggap bahwa persoalan Madura bukan hanya milik kiyai saja. Butuh komitmen bersama dari seluruh pihak untuk serius membahas pembangunan Madura di masa mendatang. Salah satu pihak yang strategis untuk diajak rembuk adalah kalangan kawula muda sebagai penerus dan yang akan mengemban tugas membangun Madura. Jelas disini butuh komunikasi dan silaturahmi yang konsisten dari seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap persoalan pembangunan Madura

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Gramedia.
- Haris, Syamsuddin. 2003. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Pers
- Horison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. PT. Prenada Media Group
- Kasdi, Aminuddin. 2007. *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa*. Yogyakarta: Jendela Grafika.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Rajawali.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Makagansa. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Fuspada.
- Ratnawati, Tri. 2008. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sjamsudin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Harmantyo, D. 2007. Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia (MAKARA, SAINS. Vol.11.No.1, April 2007).

- Hasyim, Aziz. 2010. Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara (Soladitiy, Vol 04, No. 01, 2010.)
- Z a m r o n i, I. 2012. Dinamika Elite Lokal Madura (MASYARAKAT, Vol. 17, No. 1, Januari 2012: 23-48)
- 2012
<http://tizarrahmawan.wordpress.com/2009/12/09/contoh-proposal-penelitian-kualitatif/>
 diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012

Hasil Riset

- Bank Indonesia. . 2010. *Potensi Daerah Pamekasan Madura*
- Bank Indonesia, 2010. *Potensi Daerah Sampang Madura*.
- Bank Indonesia, 2010. *potensi daerah Bangkalan Madura*.

Website

- [http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/dikses pada pukul 19.45 31 Maret 2012](http://biarhappy.wordpress.com/2011/04/11/teori-elite-politik/dikses_pada_pukul_19.45_31_Maret_2012)
- http://www.beritajatim.com/kanal.php?kanal=6/_Dewan_Adat_Ancam_Madura_Jadi_Provinsi.htm
 diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://www.harianbhirawa.co.id/opini/23864-pemekaran-propinsi-hanya-membuat-masalah-baru>
 diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1901656-apa-itu-politik/>
 diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://www.kabarindonesia.com/berita.php.htm> diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://www.kabarMadura.com//pembka-sumenep-rencanakan-dua-pemekaran-desa.html> diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://nasionalvivanews.com//291142-Madura-ancam-lepas-dari-provinsi-jatim.htm> diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://nasionalvivanews.com//204422-pemekaran-jawa-timur-tengah-dijajaki.htm> diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://provinsi-Madura.blogspot.com/2009/06/sembilan-alasan-mengapa-provinsi-Madura.html> diakses pada pukul 19.45 31 Maret 2012
- <http://tempointeraktif.com//Bupati-Sumenep-Ingin-Madura-Jadi-Provinsi.htm>
 diakses pada pukul 19.45 31 Maret